

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) OLEH DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN
PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**NAGA LANGIT TANJUNG
NPM : 157310675**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Naga Langit Tanjung
NPM : 157310675
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di
Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam Konfrehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pekanbaru, 7 September 2020
Pembimbing,

Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M,Si Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahwas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelelawan”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M,Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
8. Kepada Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan yang membantu kelancaran penulis dalam melakukan Skripsi.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 7 September 2020

Penulis
Ttd

Naga Langit Tanjung



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| PERSEMBAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH..... | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| ABSTRACT | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 17 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 17 |
| 1. Tujuan Peneliatian | 17 |
| 2. Kegunaan Peneliatian | 18 |
| BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | |
| A. Studi Kepustakaan..... | 19 |
| 1. Konsep Ilmu Pemerintahan | 19 |
| 2. Konsep Organisasi Pemerintahan | 24 |
| 3. Konsep Pengelolaan/Manajemen | 27 |
| 4. Konsep Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang..... | 32 |
| 5. Konsep Ruang Terbuka Hijau..... | 33 |
| B. Penelitian Terdahulu | 34 |
| C. Kerangka Pikir | 36 |
| D. Konsep Operasional | 37 |
| E. Operasional Variabel..... | 40 |
| F. Teknik Pengukuran | 41 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| A. Tipe Penelitian..... | 44 |
| B. Lokasi Penelitian | 45 |
| C. Populasi dan Sampel | 45 |
| D. Teknik Penarikan Sampel | 46 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 47 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 48 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 50 |
| H. Jadwal Kegiatan Penelitian | 51 |

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan..... | 52 |
| B. Keadaan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci | 60 |
| C. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan | 63 |
| D. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan | 65 |

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Identitas Responden | 66 |
| 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 66 |
| 2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia | 67 |
| 3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan | 68 |
| B. Hasil Dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Terkait Penelitian Berjudul Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan | 69 |
| 1. Pengorganisasian..... | 70 |
| 2. Perencanaan | 76 |
| 3. Pengarahan | 79 |
| 4. Pengawasan..... | 85 |
| C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Yang Berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)..... | 89 |
| D. Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Pihak Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan..... | 90 |

BAB VI : PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 92 |
| B. Saran..... | 94 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 96 |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| LAMPIRAN..... | 98 |
|----------------------|-----------|

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| II.1 | : Penelitian Terdahulu Terkait Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan | 35 |
| II.2 | : Konsep Operasional Variabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan | 40 |
| III.1 | : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan | 46 |
| III.2 | : Jadwal Waktu Penelitian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan | 51 |
| IV.1 | : Penyebaran Jumlah Penduduk Di Kabupaten Pelalawan 2018 | 55 |
| IV.2 | : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2018 | 56 |
| IV.3 | : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2018 | 56 |
| IV.4 | : Komposisi Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan | 57 |
| IV.5 | : Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Pelalawan | 58 |
| IV.6 | : Jumlah Sarana Sekolah dan Siswa SD, SLTP, dan SLTA Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 | 59 |
| IV.7 | : Pembagian Penduduk Menurut Jenis Kelamin | 60 |
| IV.8 | : Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan | 61 |
| IV.9 | : Pembagian Penduduk Menurut Agama | 62 |
| V.1 | : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat | 67 |
| V.2 | : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat | 68 |
| V.3 | : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat | 69 |
| V.4 | : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Perencanaan | 71 |
| V.5 | : Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Perencanaan | 72 |
| V.6 | : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pengorganisasian | 77 |

| | | |
|------|--|----|
| V.7 | : Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Perencanaan | 78 |
| V.8 | : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pengarahan | 81 |
| V.9 | : Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pengarahan | 82 |
| V.10 | : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pengawasan | 85 |
| V.11 | : Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pengawasan | 86 |
| V.12 | : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan | 89 |

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| II.1 : Kerangka Pikir Peneitian Yang Berjudul Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan | 37 |
| IV.1 : Peta Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 | 41 |
| IV.2 : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 65 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|---------|
| 1 : Daftar Kuesioner Masyarakat Terkait Dengan Penelitian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan | 99 |
| 2 : Daftar Wawancara Terkait Dengan Penelitian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan | 105 |
| 3 : Daftar Rekap Telly Penelitian Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan | 109 |
| 4 : Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan | 112 |
| 5 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkait Judul Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci) | 114 |
| 6 : Surat Balasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Terkait Judul Penelitian Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan | 115 |

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naga Langit Tanjung
NPM : 157310675
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi penulis telah sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 September 2020
Pelaku Pernyataan,

Naga Langit Tanjung

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK

Oleh
Naga Langit Tanjung

Kata Kunci : Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan. Indikator dari penelitian ini adalah Pengorganisasian, Perencanaan, Pengarahan, Pengawasan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Subbag Perencanaan, Seksi Pertamanan, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Masyarakat. Adapun Teknik Sampling Jenuh untuk populasi pegawai dan teknik *Purposive Sampling* untuk masyarakat, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan mendapatkan jawaban pada kategori “Cukup Terlaksana”.

MANAGEMENT OF GREEN OPEN SPACE (RTH) BY THE PUBLIC WORK OFFICES AND SPORTS MANAGEMENT IN PELALAWAN DISTRICT

ABSTRACT

By

Naga Langit Tanjung

Keywords: Management, Green Open Space

This study aims to determine the Management of Green Open Space by the Office of Public Works and Spatial Planning in Pelalawan Regency. The indicators of this research are Organizing, Planning, Directing, Supervising. This type of research located in Pelalawan District is a Descriptive Survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the objective of the research at the location under study. The population used in this study is the Head of Service, Planning Subdivision, Gardening Section, Supervision and Control Space Utilization Section, Community. The Saturated Sampling Technique for the employee population and the Purposive Sampling technique for the community, the types and data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use the frequency table tool. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the research entitled Green Open Space Management by the Public Works and Spatial Planning Office in Pelalawan District received an answer in the category of "Fairly Implemented".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik, hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1. Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Negara menurut Kranenburg (dalam Syafiie, 2010:79) adalah suatu sistem daripada tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang di atur, dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya yang juga menjadi tujuan rakyat/masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.

Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan di maksud, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang di harapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu sendiri menurut Ndraha (2003:7) bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan Dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil. Oleh karena itu adanya sebuah pemerintahan menjadi syarat mutlak yang harus ada dalam suatu Negara yang berdaulat, seperti Indonesia.

Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil, yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut Asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah. (dikutip dari Jurnal Kajian Pemerintah, Politik, dan Birokrasi/Jurnal Wedana Vol. 1 No. 2 Oktober 2015).

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan, pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2014). pembentukan Pemerintah Daerah tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan didaerah, tetapi pada dasarnya pemerintah daerah adalah merupakan seperangkat pemerintah pusat didaerah dalam rangka melaksanakan dan mempermudah jalannya roda pemerintahan yang tujuan utamanya adalah untuk mempermudah dan mempercepat jalannya roda pemerintahan.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah Urusan Pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara.

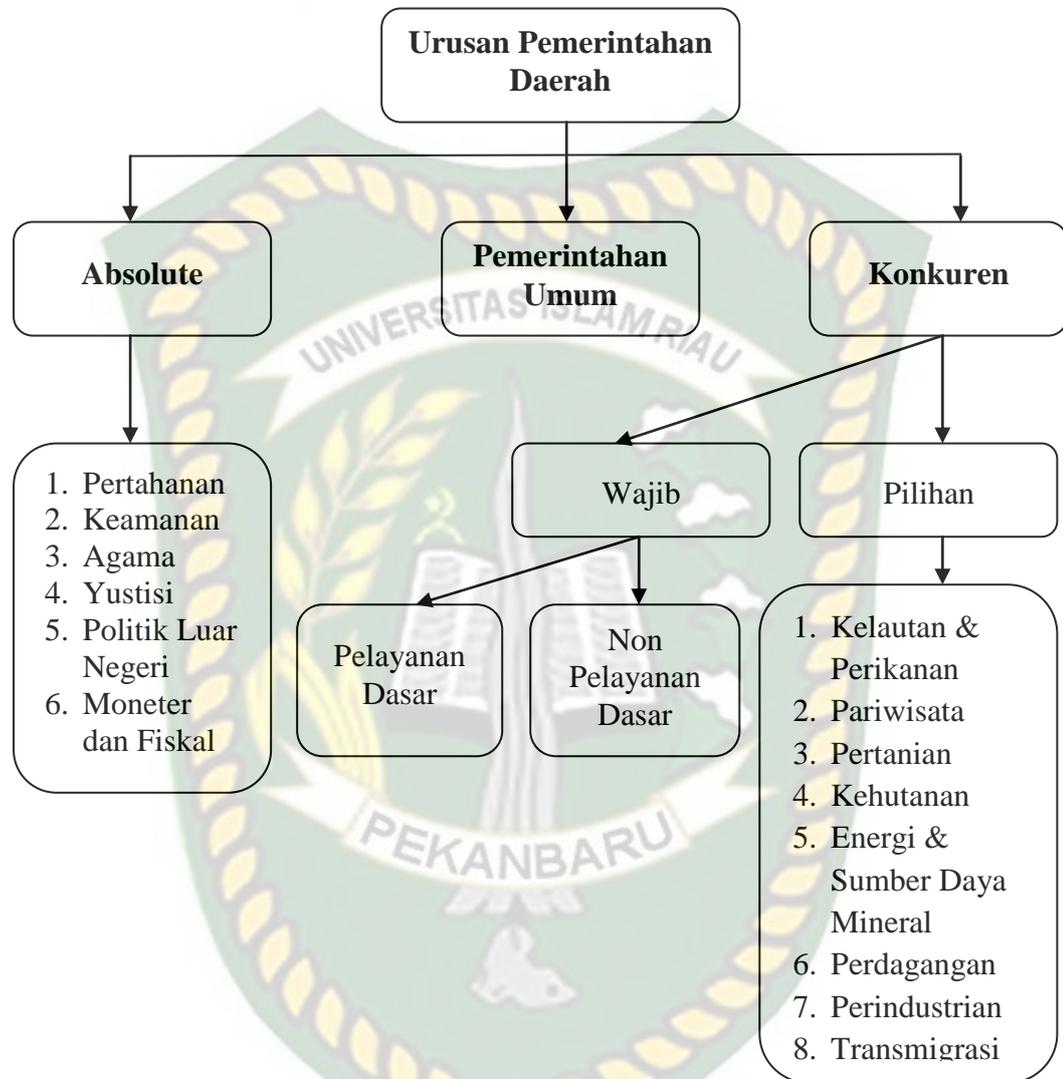
Sedangkan yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Dibentuknya pemerintah daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Indonesia.

Pada pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekuasaan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, kemudian yang disebut pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia wajib melayangkanya (Ndraha, 2003;7.) Dari penjelasan tersebut di ketahui bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu (1) Fungsi pembangunan, (2) Fungsi Pemberdayaan, (3) Fungsi Pelayanan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Sedangkan urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh semua Daerah. sedangkan Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan:

Gambar I.1: Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah



Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan UU No 23 Tahun 2014.

Adapun urusan yang diserahkan pemerintahan pusat kepada daerah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Pasal 12 yaitu:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Setatistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Sedangkan urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat atau absolute adalah:

1. Politik luar negeri
Misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga Internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri.
2. Urusan pertahanan

Misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian wilayah Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela Negara, bagi setiap warga Negara.

3. Urusan moneter dan fiscal nasional

Misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang.

4. Urusan keamanan

Mendirikan dan membentuk kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang melanggar hukum Negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan Negara.

5. Urusan yustisi

Misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesty, dan abolisi, membentuk undang-undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.

6. Urusan agama

Misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan.

Jadi dari beberapa urusan pemerintah, yang mengurus bagian pengelolaan ruang terbuka hijau atau pertamanan yang di lakukan oleh daerah adalah urusan pemerintah bagian konkuren yang dikategorikan kepada bidang yang mengatur tentang tata ruang di daerahnya masing-masing, dalam hal ini, yang bertanggung jawab dari pelaksanaan kebijakan terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pelalawan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan.

Pengertian Tata ruang itu sendiri jika diartikan berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 yaitu wujud struktur ruang dan pola ruang. Yang termasuk dalam tata ruang adalah kawasan tempat pemukiman masyarakat yang teratur, tata letak taman kota, ruang terbuka hijau yang ada didalam Kota.

Kota merupakan daerah yang memiliki mobilitas yang tinggi. Selain itu Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti Pemerintahan, Perindustrian, Perdagangan, Transportasi, Pendidikan, dan lain-lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan pembangunan. Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota, menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menambah keindahan kota, serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan akan meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida. Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, bahwa ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, social, budaya, ekonomi dan estetika.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka

Hijau Di Kawasan Perkotaan, bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompokkan, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah mengambil kebijakan bahwa Sumber Daya Alam dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan unntuk mencapai sebuah kesejahteraan bangsa dalam waktu yang tidak terbatas. Dalam kenyataannya, pembangunan kita kurang memperhatikan konsep dasar tersebut, sehingga hasilnya adalah kerusakan – kerusakan Sumber Daya Lingkungan dan bencana alam seperti, penurunan produktivits lahan, banjir pada musim penghujan, kekeringan pada musim kemarau polusi dan pengkayaan air (*water enchriment*), amblasan (*subsidence*), kemasaman sangat rendah dan karakter yang sangat sulit pulih kembali. Kerusakan Sumber Daya Lingkungan ini pula menjadi permasalahan dunia dikarenakan akibat kerusakan Sumber Daya Lingkungan ini, membuat tingkat pemanasan global menjadi sangat meningkat. Akibatnya ketidakseimbangan lingkungan ditegah pertumbuhan perkotaan mengakibatkan tingkat polusi di daerah perkotaan meningkat, hal ini terjadi karena pembangunan diperkotaan tidak diperkuat dengan adanya Ruang Terbuka Hijau yang dapat menjaga kestabilan tingkat polusi di daerah perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu elemen perkotaan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan dan aktivitas penduduk, karena pada dasarnya RTH merupakan unsur alamiah yang sangat berperan dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan (Branch, 1995). Hal ini terkait

pula dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengusung pentingnya unsur dalam keseimbangan kota. Demikian pula pernyataan Grey (1996) yang menyebutkan bahwa pengadaan RTH secara luas bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2007, Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperkotaan bertujuan untuk:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan perkotaan, dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi 5, antara lain :

1. Kawasan Hijau Pertamanan Kota
2. Kawasan Hijau Hutan Kota
3. Kawasan Hijau Rekreasi Kota
4. Kawasan Hijau Kegiatan Olahraga, dan
5. Kawasan Hijau Pemakaman.

Selain itu Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 telah mengamanatkan dalam pasal 17 bahwa :

1. Muatan Rencana Tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

2. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
3. Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
4. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
5. Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.
6. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 pada pasal 28, berisi ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
2. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
3. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah Kota sebagai pusat pelayanan social ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Jadi berdasarkan peraturan di atas yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Kota Pelelawan atau Kabupaten Pelelawan yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau juga melaksanakan Ruang Terbuka Hijau. Kabupaten Pelelawan memiliki beberapa Kecamatan yaitu: Langgam, Pangkalan

Kerinci, Bandar Sei. Kijang, Pangkalan Kuras, Ukui, Pangkalan Lesung, Bunut, Pelalawan, Bandar Petalangan, Kuala Kampar, Petalangan, Teluk Meranti.

Untuk menjalankan Ruang Tanaman Hijau yang ada di Kabupaten Pelalawan, maka Pemerintahan daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan. Adapun yang menjadi alasan ataupun tujuan perencanaan tata ruang ini termaktub dalam pasal 4 yaitu, pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, dan berhasil guna, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Serta keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Dari beberapa Kecamatan pada Kabupaten Pelalawan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah pada Kecamatan Pangkalan Kerinci. Permasalahan di kota Pangkalan Kerinci ini, seperti masalah sampah, ruang terbuka hijau, peningkatan penduduk, dan polusi menjadi permasalahan publik yang segera dicarikan solusi agar dapat meminimalisir bahkan menyelesaikan permasalahan tersebut. Inilah salah satu permasalahan publik yang menuntut pemerintah kota untuk segera menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pangkalan Kerinci adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak dijalan raya lintas Sumatra. Kawasan Perkantoran baru di Pangkalan Kerinci ini telah dibangun dikawasan Bukit Seminai yang terletak di arah Timur dari kota lama Pangkalan Kerinci tersebut. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan juga memiliki sarana dan prasarana yang sangat baik untuk

tempat rekreasi dengan sejumlah objek wisata dan salah satunya adalah Hutan kota yang ada di Pangkalan Kerinci. Penataan dengan keindahan Kota Pangkalan Kerinci ini yang merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan juga memiliki pesona wisata alam yang menyusuri sungai Kampar dengan anak-anak sungainya yang kaya akan sumber daya hayati, juga banyak terdapat danau dan tasik yang indah serta memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan-wisatawan. Selain itu di Kota Pangkalan Kerinci ini juga terdapat fasilitas lainnya seperti taman-taman yang ada disekitar kantor bupati, kolam renang, fitness center, dan masih banyak lainnya.

Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten telah mengalami penurunan daru waktu ke waktu seiring dengan perkembangan Kabupaten Pelalawan yang dinamis, sekaligus perubahan kondisi lingkungan yang makin buruk dari rahun ke tahun semakin hari keberadaan RTH semakin terdesak dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Walaupun terdapat peraturan dan standar mengenai jumlah dan luasan minimal dalam penyediaan RTH di Kabupaten Pelalawan, ternyata perwujudannya masih terbentur pada berbagai persoalan, salah satunya adalah permasalahan keterbatasan lahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan yang memiliki fungsi dalam mengatur dan mengelola Tata Ruang Kota atau Publik dan dispesifikasikan pada Ruang Terbuka Hijau ini adalah pihak Pemerintahan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Kabupaten Pelalawan khususnya pada bidang Tata Ruang.

Berdasarkan pada Perbup Nomor 60 Tahun 2016 pasal 58 tugas dari bidang Tata Ruang adalah:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan, RTH pertamanan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan, RTH pertamanan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan, RTH pertamanan serta pengawasan dan penegndalian pemanfaatan ruang.
- d. Pelaksanaan adminisitrasi bidang tata ruang, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain itu Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi: Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), rencana lainnya:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengaturan pentaan perkotaan dan perdesaan.
- b. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan pentaan ruang
- d. Penyelenggaraan pengelolaan RTH pertamanan, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- e. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan rencana detail tata ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), rencana rinci lainnya.
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fungsi bangunan
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan penertiban bangunan dengan instansi terkait
- h. Memberikan rekomendasi teknis terhadap izin mendirikan bangunan
- i. Melaksanakan penetapan kebijakan serta pengembangan pengelolaan lampu jalan, taman dan sarana prasarana lainnya.

- j. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Tata Ruang kepada Kepala Dinas.

Dari beberapa tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Tata Ruang Publik terdapat Penyelenggaraan pengelolaan RTH pertamanan, beserta sarana dan prasarana. Jadi yang bertanggung jawab dalam tata ruang dalam Kabupaten Pelalawan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga diharapkan dapat mengelola tatanan kota terutama dalam Ruang Terbuka Hijau dapat dikelola dengan baik. Tetapi masih banyak Ruang Terbuka Hijau yang mengalami alih fungsi guna lahan baik menjadi bangunan maupun menjadi lahan yang diperkeras yang tidak memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Selain itu pemerintah juga tidak konsisten dalam menjaga RTH yang ada, karena banyak alih fungsi guna lahan atau pelebaran jalan yang tidak diimbangi dengan peremajaan RTH, atau membiarkan sepadan sungai, instalasi berbahaya ditempati oleh permukiman kumuh tanpa ada sanksi yang tegas. Hal ini menjadikan RTH di perkotaan harus bersaing dengan keadaan yang sulit mulai dari keterbatasan lahan, hingga kondisi lingkungan yang buruk karena akibat populasi dari kendaraan bermotor dan utilitas lainnya.

Permasalahan hal ini tentunya dapat mengakibatkan penurunan kondisi Ruang Terbuka Hijau salah satunya diperlihatkan dengan penurunan proporsi jalur hijau sebagai salah satu elemen RTH di Pangkalan Kerinci. Padahal jalur hijau cukup berpotensi dalam upaya peningkatan RTH perkotaan.

Pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Pangkalan Kerinci berlokasi di jalan Sultan Syarif Hasyim tepat di depan kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pelalawan atau berada kawasan perkotaan Bhakti Praja. Kawasan perkantoran

baru dibangun di kawasan Bukit Semnai yang terletak pada arah timur dari kawasan Kota Lama Pangkalan Kerinci. Luas tapak yaitu 25,30 Ha termasuk luas kawasan yang sudah diperkeras 3,563 Ha. Sedangkan luas area di luas kawasan Taman Publik Kreatif Kota Pangkalan Kerinci sebagai area pengembangan adalah 31 Ha, dan luas sungai yang dilaluinya adalah 6,6 Ha. Kita dapat melihat bahwa masih banyak daerah yang belum dikelola oleh pihak pemerintah khususnya dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, dan di tambah dengan data pendukung yang penulis dapatkan dari lapangan, maka penulis menemukan fenomena-fenomena yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, dan fenomena tersebut adalah:

1. Berdasarkan hasil pra-survey penulis di lapangan, bahwa masih ditemukan kekurangan dari perencanaan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan di dalam melakukan penataan dan pemanfaatan ruang sehingga ruang Kota yang digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pelalawan masih terbatas dan lebih banyak digunakan untuk melakukan pembangunan lain.
2. Berdasarkan hasil observasi awal yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan beberapa fenomena seperti masih terbatasnya sarana dan prasarana di lokasi-lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Daerah Perkotaan, hal ini mencakup fasilitas yang mendukung masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tersebut untuk arena bermain dan juga hal lainnya.

3. Sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru banyak dalam keadaan rusak dan tidak terawat. Hal ini dikarenakan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan dalam melakukan perawatan sarana dan prasarana di ruang terbuka hijau tersebut.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga didukung dengan fakta-fakta di lapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang optimalnya penggunaan atau pengelolaan untuk Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pelalawan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah : “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latarbelakang di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk Mengetahui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan.
 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kabupaten Pelalawan.
- b. Adapun Kegunaan dari penelitian yang dilaksanakan antara lain:
1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia pada instansi terkait yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan kualitas kinerja dilapangan dan dapat memuaskan masyarakat tentunya.
 2. Akademis, untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah di peroleh terutama dalam bidang Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan.
 3. Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan juga bagi rekan-rekan yang sedang mengerjakan penelitian khususnya penelitian yang berkaitan dengan judul Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Adapun konsep-konsep dari studi kepustakaan antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

Secara umum, pengertian pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah semua kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah semua kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada

dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Pemerintah secara umum dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *government* yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus Negara dan menjalankan kehendak rakyat, kecenderungannya lebih tertuju kepada lembaga eksekutif²⁰ (*executive heavy*). “Pemerintah” atau “Pemerintahan”, adalah dua kata yang berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandate yang abash dari rakyat untuk menjalankan wewenang-wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. Definisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “kontak sosial” antara rakyat sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana mandat. Berbeda dengan istilah *governance*, maknanya lebih kompleks (*complicated*) karena menyangkut beberapa persyaratan yang terkandung dalam terminologinya, yaitu Pemerintah, dunia usaha/bisnis (*swasta, commercial society*) dan rakyat (*public*). Tata kelola pemerinatahn yang baik (*good governance*) hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan public. (dalam jurnal *Wedana* Vol. IV No 2 Oktober 2018)

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu

menurut Sarundajang (2002:5) kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya.

Menurut Ridwan (2002:2) Pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat Manan (2001:101) Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.

Menurut syafiie (2005:3) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut U. Rosenthal (dalam Syafiie, 2009:21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Selanjutnya Rosenthal dalam Ndraha (2003:611) memberikan batasan mengenai pemerintahan yaitu: Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur –

struktur dalam proses- proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal .

Menurut Ndraha (2003:7) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya Ndraha (2005;36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat.

Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu, pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). (Labolo, 2006:22)

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni Karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata dasar pemerintah, yang paling sedikit kata “ perintah “ tersebut memiliki empat unsure yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti hanya sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislative) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). (Syafiie, 2001:20)

Menurut Ewalt 2001 (dalam Munaf, 2015:32) berpendapat “*Governance identifies the power dependence involved in the relationship between institutions involved in collection. Organizations are dependent upon each other for the achievement of collective action, and thus must exchange resources and negotiate shared understandings of ultimate program goals*”, maksudnya adalah pemerintahan mengidentifikasi ketergantungan daya yang terlibat dalam hubungan antara lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif, dan dengan demikian

harus ada pertukaran sumber daya dan menegosiasikan pemahaman bersama tentang tujuan program utama (dari organisasi tersebut).

Konsep pemerintahan menurut Rasyid dalam Munaf (2015:28) adalah apa yang dilakukan oleh Pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses menegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga Negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*).

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara segara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Munaf, 2016:47)

Penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga. Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik

diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Monarki, Aristokrasi, dan Demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kriteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Kelompok ajaran klasik tersebut pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian di lanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles dan Polybios. Sedangkan dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk monarkhi da republik, pembagian bentuk pemerintahan menjadi monarkhi dan republic, pertama kali dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli dalam bukunya yang berjudul "*II Principe*". Pada perkembangannya, secara umum bentuk pemerintahan yang banyak di adopsi ialah dari teori modern. (Munaf, 2016:47)

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah didalam memenuhi kebutuhan

dan tuntutan yang diperintah dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi di antaranya terdapat banyak orang, atau hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Menurut Hasibuan (2011:120) organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Robbins dalam Ndraha (2011:235), organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Louis A.Allen dalam Hasibuan (2003:11) organisasi dapat diartikan sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan di kerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.

Sedangkan menurut John M. Pfifner dan Frank P. Sherwood dalam Hasibuan (2003:11) organisasi adalah pola keadaan di mana sejumlah orang banyak, sangat banyak mempunyai teman berhubungan langsung dengan semua

yang lain, dan menangani tugas-tugas yang kompleks, menghubungkan mereka sendiri satu sama lain dengan sadar, penentuan dan pencapaian yang sistematis dari tujuan-tujuan yang saling disetujui.

Menurut Kast dan James E. Rosenzweig dalam buku yang dikarang oleh Ismail Nawawi (2010:23) yang berjudul “Perilaku Organisasi” menyebutkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula. Definisi tersebut memberikan informasi bahwa organisasi itu terdiri dari dua bagian penting yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya.

Menurut Hasibuan (2003:11) organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafiie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan

tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafiie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Selain itu adapun unsur-unsur organisasi menurut Wursanto (2003:54) terdiri dari:

- a. Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil.
- b. Kerja sama, maksudnya adalah suatu perbuatan bantu membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dan juga menggambarkan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola (network), kebijaksanaan (policy), strategi, anggaran (budgeting), dan peraturan-peraturan (regulation) yang telah ditetapkan.
- d. Peralatan (equipment), terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin- mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/ bangunan/kantor).
- e. Lingkungan (environment)
- f. Kekayaan alam, misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora, dan fauna.
- g. Kerangka atau konstruksi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip organisasi.

3. Konsep Pengelolaan/Manajemen

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Nugroho pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber- sumber lain.

Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Sedangkan menurut Terry (2009:9) Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah, (2004:1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), memimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007: 271).

Bedasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahannya diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Selain itu, adapun fungsi pengelolaan secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahannya (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam

rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: *Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities.* Pengorganisasian merupakan pengelompokkan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan (*Direction*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128). Sedangkan tujuan dari pengawasan adalah menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum

kesulitan itu terjadi, mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi, mendapatkan efisiensi dan efektivitas.

4. Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 1 ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang dan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang .

Adapun klasifikasi penataan ruang yaitu berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri dari atas wilayah dan sistem internal perkotaan, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. Dan penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penatan ruang yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
- b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, social, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan.
- c. Geostrategic, geopolitik, dan geoekonomi.

5. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*), diperkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau atau RTH Kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tanaman hijau, baik berupa pohon besar, semak perdu, maupun rumput guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu kemanana, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. kawasan hijau kota terdiri atas lima jenis, antara lain:

- a. Kawasan hijau hutan kota
- b. Pertamanan kota
- c. Kawasan hijau rekreasi kota
- d. Kawasan hijau pekarangan
- e. Kawasan hijau kegiatan olahraga.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang /jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

- 1) Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis
- 2) Kawasan konversi air larian dengan menyediakan kolam retensi
- 3) Area pengembangan keanekaragaman hayati
- 4) Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan
- 5) Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat
- 6) Tempat pemakaman umum
- 7) Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan
- 8) Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis
- 9) penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya
- 10) Area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- 11) Ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Adapun ketentuan proporsi luas RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Proporsi itu terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH Publik. Proporsi 30 merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, dan akan meningkatkan ketersediaan udara serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika/keindahan kota.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Terkait Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan

| Nama Penileitian | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---------------------------------|---|---|--|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Muhammad Fahril Masruddin, 2017 | Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Baubau | Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Sementara Perbedaan yang dapat di lihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, dan juga peraturan yang di gunakan sebagai dasar untuk memulai penelitian ini. |
| Dian Rahmadhani, 2011 | Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Semarang | Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang ke dua ini juga masih ada pada focus penelitian tentang Ruang Terbuka Hijau Publik | Sementara perbedaan yang ada yaitu, tahun penyusunan penelitian, lokasi penelitian, permasalahan penelitian, dan juga teori yang di gunakan. |

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

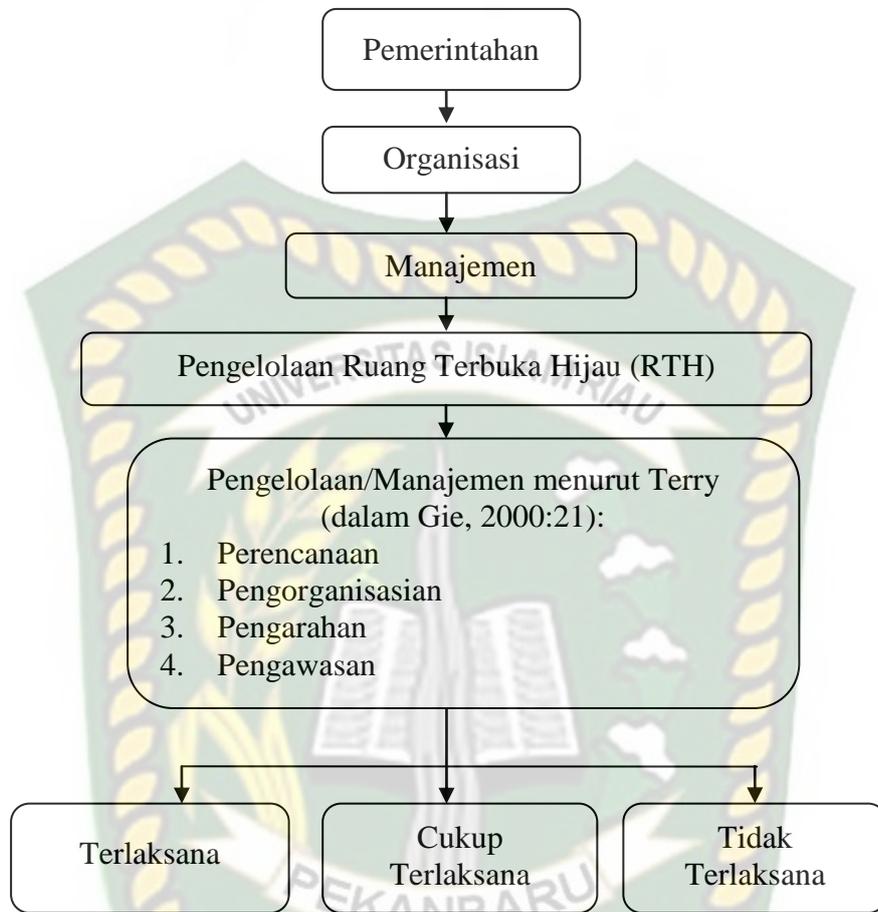
Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terkait Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelelawan. Pada tabel pertama adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus penelitian yang ada pada pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, dan juga peraturan yang di gunakan sebagai dasar untuk memulai penelitian ini.

Sedangkan pada tabel ke dua persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitian yang ada pada pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah tahun penyusunan penelitian, lokasi penelitian, permasalahan penelitian, dan juga teori yang di gunakan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan. konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan konsep penelitian yang sedang di teliti.

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelelawan



Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2019.*

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pusat dengan

daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

2. Konsep organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.
3. Konsep Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.
4. Indikator dari variable Pengelolaan/Manajemen adalah sebagai berikut:
 - a) Perencanaan (*Planning*)

Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.
 - b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: *Organizing is grouping activities, assigning activities an providing the authority necessary to carry out the activities.* Pengorganisasian merupakan pengelompokkan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan

penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

c) Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan (*Direction*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya

d) Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128). Sedangkan tujuan dari pengawasan adalah menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi, mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi, mendapatkan efisiensi dan efektivitas.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan

| Konsep | Variabel | Indikator | Item Penilaian | Ukuran |
|--|---------------------------------------|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Menurut Admosudirjo (2005:160) Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1. Perencanaan | a. Adanya SOP dalam melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau b. Tersedia Sumber daya dan Sarana prasarana dalam melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana |
| | | 2. Pengorganisasian | a. Pihak Dinas melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk bekerja sama dalam melakukan pengelolaan RTH b. Memiliki pembagian kerja yang jelas dalam melakukan pengelolaan, sehingga dapat mewujudkan RTH yang dicapai. | Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana |
| | | 3. Pengarahan | a. Adanya peringatan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dalam menjaga dan merawat RTH b. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang merusak RTH | Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana |

| | | | | |
|--|--|---------------|---|---|
| | | 4. Pengawasan | a. Melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan b. Selalu melakukan evaluasi setiap melakukan pengawasan di lapangan | Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana |
|--|--|---------------|---|---|

Sumber: Olahan Data Penulis Tahun 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga skala) kategori yaitu Terlaksana, Cukup Terlaksana, Tidak Terlaksana. Dan ukuran variabel nya dapat di lihat di bawah ini:

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelelawan Pada Tingkat Persentase Antara 67%-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelelawan Berada Pada Tingkat Persentase Antara 34%-100%

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelelawan Antara 33%-100%

a. Perencanaan (*Planning*)

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perencanaan (*Planning*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perencanaan (*Planning*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perencanaan (*Planning*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengorganisasian (*Organizing*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengorganisasian (*Organizing*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengorganisasian (*Organizing*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

c. Pengarahan (*Actuating*)

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengarahan (*Actuating*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengarahan (*Actuating*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengarahan (*Actuating*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

d. Pengawasan

Terlaksana : Jika Pengawasan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengawasan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengarahan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelelawan.

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. (Sugiono, 2016;63).

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetail dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram sangat memudahkan untuk di baca.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Pelelawan
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelelawan

Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan permasalahan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Pelelawan

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi, 2012;254). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu meliputi: Kepala Dinas, Subbag Perencanaan, Seksi Pertamanan, Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang, Masyarakat.

2. Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representatif (mewakili). Agar dapat

memberikan informasi secara jelas dan lengkap. Adapun sampel dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel di bawah:

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan

| No | Sub Populasi | Populasi | Sampel | Persentas |
|---------------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Hasan Tua Tanjung, MT) | 1 | 1 | 100 % |
| 2 | Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (Kurnia, STP., M.SI) | 1 | 1 | 100 % |
| 3 | Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (Isran Syampuli Tanjung) | 1 | 1 | 100 % |
| 4 | Masyarakat Di Kabupaten Pelalawan (Kecamatan Pangkalan Kerinci) | 124.974 | 50 | 0,04% |
| Jumlah | | 124.978 | 54 | 0,04% |

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penentuan sampel pada Kepala Dinas, Subbag Perencanaan, Seksi Pertamanan, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

- b. Untuk Masyarakat penulis menggunakan penarikan sampel menggunakan Purposive Sampling, Metode *Purposive Sampling* adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden yang berkaitan dengan judul Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan
- b. Tanggapan responden tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan Data Sekunder.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari

dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti.

Dan adapun responden yang di bagikan angket guna mengumpulkan data adalah Masyarakat untuk menilai apakah Pengelolaah Ruang Terbuka Hijau sudah dilaksanakan dengan baik.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang

lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan.
- d. Melangsungkan alur wawancara.
- e. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
- h. Membandingkan hasil wawancara dengan kondisi sesungguhnya.

i. Membuat kesimpulan terhadap hasil wawancara yang dilakukan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Data yang diperoleh dari data hasil wawancara penulis dan kuesioner terhadap Masyarakat yang akan menilai apakah pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan sudah dilaksanakan dengan baik.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan

| No | Jenis Kegiatan | Tahun 2019-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Penyusunan Proposal | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ujian Proposal | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi Proposal | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kuisisioner | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rekomendasi survey | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Survey Lapangan | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Analisis data | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyusunan Laporan Hasil Penelitian. | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 9 | Konsultasi Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 10 | Ujian Konferehensif Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| 11 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |
| 12 | Pengandaan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |

Sumber: Olahan Data Penulis 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Sejarah Singkat Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940 -1945.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan ibukota berkedudukan di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci.

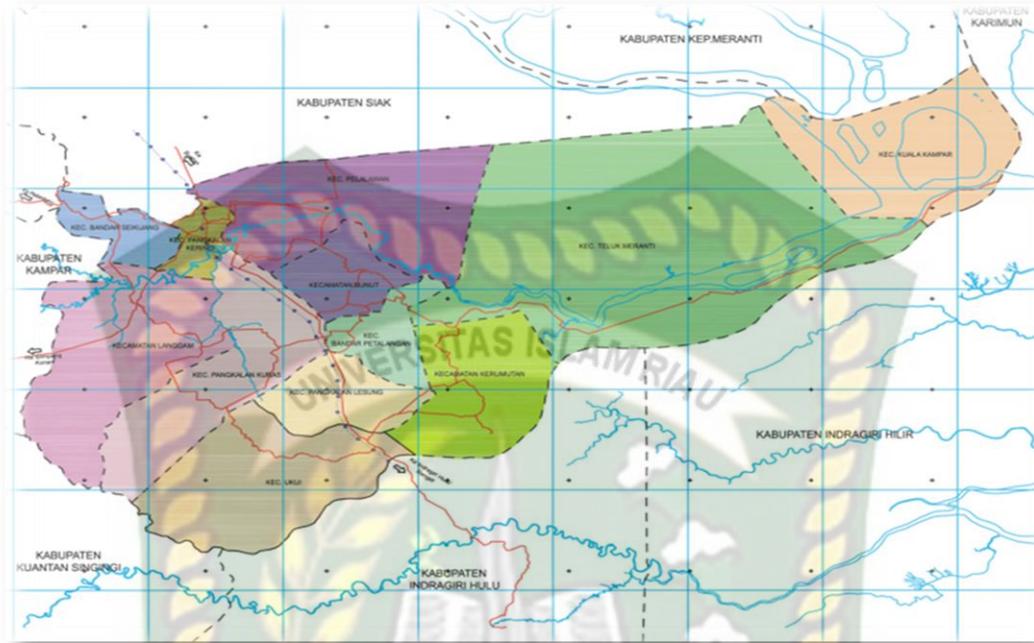
Pembentukan Kabupaten Pelalawan didasarkan kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai, dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Kampar.

Secara geografis luas Kabupaten Pelalawan adalah 13.822,10 km², yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebuh, dan Pulau-Pulau kecil lainnya. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatra yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur dan Kabupaten Karimun.

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur pulau sumatera dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka, secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Merati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Sebelah Barat : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar;
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar IV.1 : Peta Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber: RTRW Kabupaten Pelalawan, 2018

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan sebesar 13.822,10 Km² (termasuk luas lautan) yang terdiri dari 12 kecamatan, 14 kelurahan, 104 desa, 645 RW dan 1.840 RT. Persentase luas wilayah dan luas masing-masing kecamatan terdapat pada grafik 1.1. dan tabel 1.1 dan dibawah ini.

Wilayah Kabupaten Pelalawan memiliki iklim tropis dengan kondisi topografi daerah yang mempunyai ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 2 M s.d 40 M. Daerah atau kota yang tertinggi adalah Langgam, Pangkalan Kerinci, Sorek I, Pangkalan Lesung, Ukui, Bandar Seikijang dengan tinggi diatas 30 M dan yang terendah adalah Teluk Dalam dengan tinggi 2 M.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan berjumlah

428.150 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 219.754 jiwa (51,33%) dan perempuan sebesar 208.396 jiwa (48,67%) dengan 103.164 kepala keluarga.

Tabel IV.1 : Penyebaran jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan 2018

| No | Kecamatan | Luas | Jumlah | Penduduk | | | | Jiwa/ |
|----|-------------------|--------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|-----------------|
| | | (km ²) | KK | Laki-laki | Perem. | Jumlah | % | km ² |
| 1 | Langgam | 1,453.07 | 7,325 | 16,119 | 15,128 | 31,247 | 7.30 | 21.50 |
| 2 | Pangkalan Kerinci | 195.32 | 28,333 | 61,416 | 58,922 | 120,338 | 28.11 | 616.11 |
| 2 | Bandar Sei Kijang | 306.87 | 7,945 | 18,306 | 17,080 | 35,386 | 8.26 | 115.31 |
| 4 | Pangkalan Kuras | 1,200.08 | 14,557 | 30,727 | 29,248 | 59,975 | 14.01 | 49.98 |
| 5 | Ukui | 1,345.19 | 10,067 | 20,853 | 18,924 | 39,777 | 9.29 | 29.57 |
| 6 | Pangkalan Lesung | 509.29 | 8,056 | 16,611 | 15,504 | 32,115 | 7.50 | 63.06 |
| 7 | Bunut | 423.00 | 3,943 | 7,887 | 7,760 | 15,647 | 3.65 | 36.99 |
| 8 | Pelalawan | 1,482.65 | 4,844 | 10,379 | 9,476 | 19,855 | 4.64 | 13.39 |
| 9 | Bandar Petalangan | 372.31 | 3,631 | 7,161 | 7,127 | 14,288 | 3.34 | 38.38 |
| 10 | Kuala Kampar | 698.36 | 4,288 | 9,218 | 8,873 | 18,091 | 4.23 | 25.90 |
| 11 | Kerumutan | 956.84 | 6,045 | 12,304 | 11,815 | 24,119 | 5.63 | 25.21 |
| 12 | Teluk Meranti | 4,212.82 | 4,130 | 8,773 | 8,539 | 17,312 | 4.04 | 4.11 |
| | Jumlah | 13,155.79 | 103,164 | 219,754 | 208,396 | 428,150 | 100.00 | 32.54 |

Sumber : Kabupaten Pelalawan tahun 2018

Penyebaran penduduk tidak merata di setiap kecamatan. Penyebaran penduduk yang paling padat sebesar 616,11 jiwa/km² berada pada Kecamatan Pangkalan Kerinci dan yang paling jarang sebanyak 4,11 jiwa/km² di Kecamatan Teluk Meranti. Tingkat rata-rata penyebaran penduduk dibandingkan luas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 32,54 jiwa/km². Untuk mendorong penyebaran penduduk yang lebih merata pada masing-masing kecamatan, pemerintah daerah akan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan yang baru di kecamatan yang penduduknya masih jarang dan yang memiliki keunggulan ekonomis serta potensi daerah.

Berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2018 sebanyak

428.150 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 219.754 jiwa (51,33%) dan perempuan sebesar 208.396 jiwa (48,67%).

Tab IV.2 : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2018

| No | Umur | Jumlah | % | Laki-laki | % | Perempuan | % |
|----|---------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 1 | 0-4 | 53.620 | 12,52 | 26.751 | 12,17 | 26.869 | 12,89 |
| 2 | 5-9 | 45.837 | 10,71 | 23.147 | 10,53 | 22.690 | 10,89 |
| 3 | 10-14 | 38.096 | 8,90 | 19.120 | 8,70 | 18.976 | 9,11 |
| 4 | 15-19 | 34.596 | 8,08 | 17.662 | 8,04 | 16.934 | 8,13 |
| 5 | 20-24 | 39.797 | 9,30 | 19.741 | 8,98 | 20.056 | 9,62 |
| 6 | 25-29 | 45.349 | 10,59 | 23.160 | 10,54 | 22.189 | 10,65 |
| 7 | 30-34 | 40.896 | 9,55 | 21.073 | 9,59 | 19.823 | 9,51 |
| 8 | 35-39 | 36.084 | 8,43 | 18.780 | 8,55 | 17.304 | 8,30 |
| 9 | 40-44 | 30.143 | 7,04 | 16.013 | 7,29 | 14.130 | 6,78 |
| 10 | 45-49 | 22.178 | 5,18 | 12.085 | 5,50 | 10.093 | 4,84 |
| 11 | 50-54 | 16.007 | 3,74 | 8.671 | 3,95 | 7.336 | 3,52 |
| 12 | 55-59 | 10.887 | 2,54 | 6.008 | 2,73 | 4.879 | 2,34 |
| 13 | 60-64 | 6.716 | 1,57 | 3.537 | 1,61 | 3.179 | 1,53 |
| 14 | 65-69 | 3.740 | 0,87 | 2.008 | 0,91 | 1.732 | 0,83 |
| 15 | 70-74 | 2.157 | 0,50 | 1.100 | 0,50 | 1.057 | 0,51 |
| 16 | 75+ | 2.047 | 0,48 | 898 | 0,41 | 1.149 | 0,55 |
| | Jumlah | 428.150 | | 219.754 | | 208.396 | |

Sumber : Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Tabel 4.3 : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2018

| No. | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | 0 – 4 | 25,791 | 25,924 | 51,715 |
| 2. | 5 – 9 | 22,080 | 21,568 | 43,648 |
| 3. | 10 - 14 | 18,321 | 18,222 | 36,543 |
| 4. | 15 - 19 | 16,889 | 16,242 | 33,131 |
| 5. | 20 - 24 | 19,196 | 19,516 | 38,712 |
| 6. | 25 - 29 | 22,023 | 21,099 | 43,122 |
| 7. | 30 - 34 | 20,093 | 19,012 | 39,105 |
| 8. | 35 - 39 | 18,070 | 16,475 | 34,545 |
| 9. | 40 - 44 | 15,024 | 13,182 | 28,206 |
| 10. | 45 - 49 | 11,209 | 9,345 | 20,554 |
| 11. | 50 - 54 | 7,996 | 6,761 | 14,757 |
| 12. | 55 - 59 | 5,502 | 4,433 | 9,935 |
| 13. | 60 - 64 | 3,177 | 2,849 | 6,026 |
| 14. | 65 - 69 | 1,801 | 1,570 | 3,371 |
| 15. | 70 - 74 | 1,018 | 981 | 1,999 |
| 16. | 75 + | 827 | 1,058 | 1,885 |
| JUMLAH | | 209,017.00 | 198,237.00 | 407,254.00 |

Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2018

Secara umum, penduduk Kabupaten Pelalawan bekerja sebagai petani dan nelayan. Kondisi ini selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari daratan dan beberapa pulau. Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

| No. | Lapangan Pekerjaan | Jenis Kelamin | | Jumlah | |
|-----|------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jiwa | % |
| 1 | Pertanian dan Perikanan | 59,70 | 44,58 | 225.293 | 55,32 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | - | - | - | - |
| 3 | Industri | 10,40 | 1,18 | 31.481 | 7,73 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air | 0,73 | 0,34 | 2.525 | 0,62 |
| 5 | Bangunan dan Konstruksi | 4,17 | 1,17 | 13.439 | 3,30 |
| 6 | Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel | 7,94 | 24,17 | 51.477 | 12,64 |
| 7 | Transportasi dan Komunikasi | 4,89 | - | 14.172 | 3,48 |
| 8 | Keuangan dan Asuransi | 1,99 | 1,87 | 7.941 | 1,95 |
| 9 | Jasa | 10,18 | 26,69 | 60.925 | 14,96 |
| | Jumlah | 100 | 100 | 407.254 | 100 |

Sumber: Diolah dari Pelalawan Dalam Angka 2018

Komposisi penduduk yang bekerja sebagai petani dan nelayan (sektor pertanian dan perikanan) mencapai 55,32 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 55,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan dan kesejahteraan penduduk sangat tergantung pada hasil alam yang rentan terhadap perubahan topografi darat dan laut. Ke depan, program pengembangan sektor pertanian dan perikanan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jika sektor ini dikelola dengan baik maka dampak topografi yang tidak mendukung seperti musim angin utara, musim hujan dan musim kemarau dapat diminimalkan.

Meskipun kekayaan alam Kabupaten Pelalawan diperkirakan cukup memadai beberapa tahun ke depan, kondisi tersebut tidak menjamin bahwa Kabupaten Pelalawan akan mampu bersaing dengan pemerintah daerah lain yang sudah lebih dahulu membenahi SDM-nya. Oleh karena itu, selain

menatausahakan kekayaan alam dengan profesional diperlukan juga SDM yang handal di bidangnya sehingga kekayaan alam yang melimpah dapat diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Tabel IV.5 : Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Pelalawan

| No | Uraian | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
|----|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | | Jiwa | % |
| 1 | Belum Sekolah | 407.254,00 | 11.810,37 | 2,90 |
| 2 | Belum Tamat SD | | 80.269,76 | 19,71 |
| 3 | SD | | 118.714,54 | 29,15 |
| 4 | SLTP | | 81.898,78 | 20,11 |
| 5 | SMA | | 96.682,10 | 23,74 |
| 6 | Diploma | | 4.194,72 | 1,03 |
| 7 | Sarjana | | 13.683,73 | 3,36 |
| | Jumlah | | 407.254,00 | 100,00 |

Sumber: Diolah dari Pelalawan Dalam Angka 2018

Berdasarkan data tersebut di atas, komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan belum memadai di Kabupaten Pelalawan, karena penduduk yang telah melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi hanya 4,39% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pelalawan. Sedangkan sisanya sebesar 95,61% belum pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi.

Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, jumlah siswa dan tenaga pendidik di Kabupaten Pelalawan sampai dengan tahun 2018 dapat terlihat pada tabel IV.6 berikut:

Tabel IV.6 : Jumlah Sarana Sekolah dan Siswa SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

| NO | KECAMATAN | SD/MI | | | JML | SLTP/MTs | | | JML | SMA/SMK | | JML |
|----|-------------------|------------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | N | S | MI | SISWA | N | S | MTs | SISWA | N | S | SISWA |
| 1 | Pangkalan Kerinci | 14 | 12 | 1 | 12,726 | 4 | 9 | 3 | 4,662 | 4 | 7 | 4,432 |
| 2 | Pangkalan Kuras | 28 | 4 | 0 | 8,903 | 8 | 1 | 3 | 3,368 | 3 | 1 | 1,880 |
| 3 | Kuala Kampar | 24 | 0 | 1 | 2,344 | 7 | 0 | 1 | 790 | 2 | 0 | 491 |
| 4 | Ukui | 19 | 5 | 1 | 5,248 | 5 | 1 | 4 | 1,759 | 2 | 2 | 786 |
| 5 | Kerumutan | 21 | 0 | 0 | 3,036 | 4 | 0 | 1 | 853 | 2 | 0 | 659 |
| 6 | Langgam | 17 | 1 | 1 | 4,724 | 4 | 0 | 4 | 1,411 | 3 | 1 | 862 |
| 7 | Pelalawan | 14 | 2 | 0 | 2,137 | 6 | 0 | 0 | 373 | 1 | 0 | 74 |
| 8 | Teluk Meranti | 14 | 0 | 0 | 1,927 | 4 | 1 | 1 | 715 | 3 | 0 | 424 |
| 9 | Pangkalan Lesung | 14 | 1 | 0 | 3,454 | 3 | 0 | 4 | 1,109 | 2 | 0 | 970 |
| 10 | Bunut | 14 | 1 | 0 | 2,009 | 2 | 0 | 1 | 735 | 2 | 0 | 650 |
| 11 | Bandar Petalangan | 11 | 2 | 0 | 2,205 | 1 | 2 | 0 | 776 | 1 | 1 | 575 |
| 12 | Bandar Sei Kijang | 8 | 1 | 0 | 2,690 | 3 | 0 | 1 | 1,123 | 2 | 1 | 931 |
| | JUMLAH | 198 | 29 | 4 | 51,403 | 51 | 14 | 23 | 17,674 | 27 | 13 | 12,734 |
| | TOTAL | 231 | | | | 88 | | | | 40 | | |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Pelalawan Tahun 2018.

Dari tabel diatas sampai dengan tahun 2018 jumlah sekolah dasar (SD/MI) adalah sebanyak 231 dengan jumlah siswa 51.403 orang, dan jumlah SMP/MTs sebanyak 88 sekolah dengan jumlah siswa 17.674 orang serta jumlah SMA/SMK sebanyak 40 sekolah dengan jumlah siswa 12.734 orang yang tersebar di dua belas kecamatan.

Indikator mendasar tingkat pendidikan juga diukur dari kemampuan baca-tulis penduduk dewasa. Kemampuan baca-tulis tercermin dari data angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas huruf latin dan huruf lainnya. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pelalawan tahun 2016, persen penduduk yang dapat membaca dan menulis (melek huruf) tahun 2015 sebesar 98,87 % dan persentase penduduk yang buta huruf adalah sebesar 1,13 %. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih besar dibanding penduduk laki-laki, yaitu 1,84% berbanding 0,45%.

Potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pelalawan relatif besar

dan masih sebagian kecil yang dikelola. Luas potensi lahan sawah dan bukan sawah s.d. tahun 2014 adalah 853.815 ha yang terdiri dari lahan sawah 7.439 ha dan non sawah 846.376 ha. Lahan sawah berada pada 10 kecamatan yaitu Langgam, Pangkalan Kuras, Ukui, Pangkalan Lesung, Bunut, Pelalawan, Bandar Petalangan, Kuala Kampar, Kerumutan, dan Teluk Meranti. Sedangkan non sawah tersebar di semua kecamatan.

B. Keadaan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci

a. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara langsung mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena semakin meningkat populasi penduduk suatu daerah akan diikuti dengan pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut. Berdasarkan data statistik kependudukan Kecamatan Pangkalan Kerinci diterangkan bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah 84.865 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya 1433 Jiwa/km². Adapun Jumlah penduduk yang terbagi sesuai jenis kelamin seperti tabel di bawah ini:

Tabel IV.7: Pembagian Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk |
|---------------|---------------|-----------------|
| 1. | Laki-Laki | 49.442 |
| 2. | Perempuan | 35.423 |
| Jumlah | | 84.865 |

Sumber: Data Statistik Kantor Kecamatan Pangkalan Kerinci

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki jumlah penduduk yang digolongkan menurut jenis kelamin yang terdiri atas 49.442 jiwa Penduduk laki – laki dan 35.423 jiwa penduduk perempuan. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu berjumlah 49.442 jiwa.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah, apabila semakin pesat perkembangan pendidikan suatu daerah maka semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan pembangunan daerah itu. Kualitas pendidikan ini akan membaik apabila pemerintah setempat menyediakan fasilitas pendidikan yang baik pula sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut pembagian penduduk menurut jenjang pendidikan yang di klasifikasikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.8: Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

| No. | Penduduk Berdasarka Pendidikan | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|---------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | Belum Sekolah | 7.519 |
| 2 | Tidak Tamat Sekolah Dasar | 4.995 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 4.327 |
| 4 | Tamat SLTP/sederajat | 9.228 |
| 5 | Tamat SLTA/sederajat | 35.382 |
| 6 | Tamat Akademi/sederajat | 10.974 |
| 7 | Tamat Perguruan Tinggi/sederajat | 8.955 |
| 8 | Buta Huruf | 3.485 |
| Jumlah | | 84.865 |

Sumber: Data Statistik Kecamatan Pangkalan Kerinci

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang tamat SLTA/ sederajat yaitu sebanyak 35382 jiwa, Ini menunjukkan bahwa tingkat 17 pendidikan penduduk di Kecamatan Pangkalan Kerinci tergolong cukup baik.

c. Agama

Selain dalam Bidang Pendidikan faktor yang menunjang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia suatu daerah juga di dukung oleh faktor moralitas masing – masing individu daerah tersebut. Tentunya faktor ini berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan yang dianut individu itu sendiri. Menurut data yang bersumber dari Kantor Kecamatan Pangkalan Kerinci ini, Penduduk wilayah ini mayoritas beragama Islam. Tetapi selain itu, di daerah ini juga berkembang agama yang lain yaitu meliputi Khatolik, Protestan, Hindu dan Budha. berikut Jumlah Penduduk yang digolongkan berdasarkan agama yang dianut sesuai data pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.9: Pembagian Penduduk Menurut Agama

| No. | Agama | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|---------------|-----------|------------------------|
| 1 | Islam | 68.842 |
| 2 | Khatolik | 4.403 |
| 3 | Protestan | 10.700 |
| 4 | Hindu | 280 |
| 5 | Budha | 640 |
| Jumlah | | 84.865 |

Sumber: Data Statistik Kecamatan Pangkalan Kerinci

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam sangat dominan di wilayah ini yaitu berjumlah 68.842 jiwa. Agama yang beragam

tidak membuat antar masyarakat saling bertikai dalam urusan 18 agama, mereka tetap bisa saling menghargai dan menghormati terbukti dengan lancarnya segala kegiatan beragama yang dilaksanakan di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ini tanpa adanya gangguan dari pemeluk agama lain.

C. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan salah satunya memiliki tugas dalam melakukan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Pelalawan untuk mewujudkan visi dan misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan

Karena Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan merupakan Dinas yang baru dibentuk pada awal tahun 2013 ini, maka untuk Visi dan Misi sementara ini masih memakai visi dan Misi dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan yaitu :

“Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap Serta Pengelolaan Sumber Daya Air yang Harmonis Dalam Rangka Mendukung Kemandirian Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pelalawan”

Sedangkan Misi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Membangun jaringan jalan dan jembatan
2. Memelihara kemantapan kondisi jalan dan jembatan
3. Meningkatkan harmonis SDA melalui optimalisasi fungsi jaringan irigasi serta pemanfaatan irigasi/rawa
4. Meningkatkan pengelolaan sumber air baku dan pengendalian terhadap banjir dan daya rusak air
5. Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur dan peralatan di bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air.

Selain itu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan juga memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana di atur dalam Draf Rancangan Peraturan Bupati Pelalawan tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

Tugas:

“Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dalam lingkup ke-PU-an
- b. Penyelenggaran dan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dalam lingkup ke-PU-an
- c. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya dan bina teknik
- e. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- f. Pemberdayaan dan pembinaan administrasi terhadap kelompok jabatan fungsional
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



STRUKTUR ORGANISASI

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden merupakan salah satu pendukung dalam menentukan hasil penelitian penulis. Responden juga merupakan sangat berperan penting dalam mempermudah penulis melakukan penelitian dengan cara memberikan tanggapan terhadap kuesioner yang penulis ajukan kepada mereka, dan juga dengan memberikan informasi kepada penulis sesuai yang mereka ketahui. Agar penulis mendapatkan hasil penelitian yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak Kepala Dinas PUPR, Subbag Perencanaan Dinas PUPR, Seksi Pertamanan Dinas PUPR, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di Kabupaten Pelalawan berjumlah 50 orang sampel.

Sehubungan dengan penelitian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan diperlukannya data ataupun identitas responden, maka berikut akan di paparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan golongan.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan, selain melakukan wawancara juga digunakan dengan cara penyebaran kuesioner, oleh karena itu sangat diperlukan penulis mengetahui identitas masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Kerinci. Untuk pertama yang perlu di ketahui

dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang akan dipaparkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat

| No | Klasifikasi Responden | Jumlah | Persentase % |
|---------------|-----------------------|-----------|--------------|
| 1 | Laki-Laki | 30 | 60% |
| 2 | Perempuan | 20 | 40% |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2020

Dari tabel V.1 di atas dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian membahas tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 30 orang (60%) dan jumlah responden peserta perempuan berjumlah 20 orang (40%) dari total keseluruhan 50 Orang responden masyarakat.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan, serta dengan cara penyebaran kuisisioner, maka identitas responden penelitian yang kedua yang ingin penulis ingin ketahui adalah dari segi usia pada masyarakat yang menjadi responden, karena usia sangat ditentukan dalam kematangan dalam menilai, dan tentunya usia yang dipilih adalah masyarakat yang memiliki pemikiran yang sehat dan sudah memiliki keputusan dalam hidupnya. Untuk melihat latar belakang usia responden, penulis memberikan interval angka untuk

mempermudah peneliti. Berikut tabel berdasarkan latar belakang usia masyarakat yang di jadikan responden:

Tabel V.2: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat

| No | Klasifikasi Responden | Frekuensi | Persentase % |
|---------------|-----------------------|-----------|--------------|
| 1 | 20-30 Tahun | 10 | 20% |
| 2 | 31-40 Tahun | 25 | 50% |
| 3 | 41-50 Tahun | 12 | 24% |
| 4 | >50 Tahun | 3 | 6% |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2020

Dari tabel V.2 di atas dinyatakan bahwa responden dari masyarakat dominan memiliki usia dari interval 31-40 Tahun yaitu berjumlah 25 orang (50%), selanjutnya usia interval 41-50 Tahun yaitu berjumlah 12 orang (24%), sedangkan usia pada interval 20-30 Tahun yaitu berjumlah 10 orang (20%) dan yang paling minim adalah usia pada interval >50 Tahun yaitu berjumlah 3 orang (6%) dari jumlah total keseluruhan masyarakat yaitu 50 orang.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan, maka identitas responden masyarakat dalam penelitian ini yang digunakan berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan, karena pendidikan sangat menentukan pengalaman dan cara pandang dalam menyikapi dalam suatu masalah. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup baik akan mudah dan cepat tanggap dalam

memberikan pendapat dan tentunya cara penyampaiannya atau komunikasi akan berbeda dengan masyarakat yang kurang baik pendidikannya. Berikut penulis akan paparkan dalam bentuk Tabel:

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Masyarakat

| No | Klasifikasi Responden | Frekuensi | Persentase % |
|---------------|-----------------------|-----------|--------------|
| 1 | SD | 0 | 0% |
| 2 | SMP | 2 | 4% |
| 3 | SMA | 28 | 56% |
| 4 | Diploma | 8 | 16% |
| 5 | Sarjana S1/S2 | 12 | 24% |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2020

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden masyarakat dominan memiliki pendidikan SMA yaitu berjumlah 28 orang (56%), selanjutnya tingkat pendidikan Sarjana berjumlah 12 orang (24%), dan tingkat pendidikan Diploma berjumlah 8 orang (16%), dan yang paling minim adalah tingkat pendidikan SMP berjumlah 2 orang (4%).

B. Hasil dan Pembahasan Mengenai indikator Variabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Jadi observasi dapat diartikan sebagai pengamatan yang di lakukan penulis di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada di lapangan untuk

dijadikan sebagai data konkrit dan disusun dalam bentuk tabel dan diuraikan di dalam penelitian ini dengan menggunakan tolak ukur seperti indikator. Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan. Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu Perencanaan, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut ini:

1. Perencanaan

Menurut Handyaningrat (2007:89) perencanaan adalah proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan tentang kegiatan-kegiatan pada masa yg akan datang dengan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan melalui penggunaan saran yg tersedia. Menurut Rustiadi (2008:339) Perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yg ingin dicapai di masa yg akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yg dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu aktivitas yg dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yg ingin dicapai di masa yg akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yg dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yg ada,

mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arrah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang pertama yaitu tentang Perencanaan maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Perencanaan.

| No | Sub Indiaktor | Kategori Ukuran | | | Jumlah |
|----|--|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Terlaksana | Cukup Terlaksana | Kurang Terlaksana | |
| 1 | Adanya SOP dalam melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | 15 | 25 | 10 | 50 |
| 2 | Tersedia Sumber daya dan sarana prasarana dalam melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | 10 | 12 | 28 | 50 |

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2020

Dari data tabel V.4 di atas diketahui tanggapan responden untuk indikator pertama yang membahas tentang perencanaan yang dinilai pada item pertama yaitu adanya sop dalam melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau, yang memberikan tanggapan pada kategori “Terlaksana” berjumlah 15 orang, selanjutnya pada kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 25 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 10 orang.

Pada item kedua yaitu tersedia sumber daya dan sarana prasarana dalam melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang memberikan tanggapan pada kategori “Telaksana” berjumlah 10 orang, selanjutnya masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Terlaksana” berjumlah 12 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 28 orang.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden masyarakat pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

Tabel V.5 : Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Perencanaan

| No | Sub Indiaktor | Kategori Ukuran | | | Jumlah |
|---|--|-----------------|------------------|-------------------|------------|
| | | Terlaksana | Cukup Terlaksana | Kurang Terlaksana | |
| | | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | Adanya SOP dalam melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | 45 | 50 | 10 | 105 |
| 2 | Tersedia Sumber daya dan sarana prasarana dalam melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | 30 | 24 | 28 | 82 |
| Total Skor | | | | | 187 |
| <p>Skor Tertinggi = 50 x 3 = 150 2 Indikator = 150 x 2 = 300</p> <p>Persentase Jawaban Responden $\frac{187}{300} \times 100\% = 62\%$</p> | | | | | |

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Dilapangan 2020

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan memperoleh hasil 62% dengan kategori “Cukup Terlaksana”.

Untuk melengkapi hasil penelitian yang telah penulis temukan diatas, dimana pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan sistem penyebaran kuesioner, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang juga penulis lakukan bersama dengan informan penulis yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, hasil wawancara ini akan menegaskan jawaban yang diberikan oleh informan terhadap penelitian ini, dimana dengan adanya jawaban yang diberikan, maka akan menyeimbangkan hasil penelitian berdasarkan fakta fakta yang sesungguhnya dilapangan.

Adapun hasil wawancara yang akan penulis sajikan berkaitan dengan indikator yang pertama dengan sub indikatornya yang membahas tentang dibentuknya Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan tugas dilapangan, dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Kurnia, S.TP., M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, dimana hasil wawancara penulis dengan beliau yang membahas tentang SOP pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

“Sudah pasti ada, tidak mungkin kita memberikan perintah tanpa dilengkapi standar kerja yang harus mereka jalankan, bisa-bisa kacau nanti dilapangan, standar operasional prosedur tentunya diberikan secara langsung melalui mandor lapangan, dimana nantinya beliau lah yang akan mengarahkan para petugas dilapangan, karna sebagai penanggungjawab beliau lah yang bertugas untuk itu, beberapa isi dari

SOP tersebut adalah tentang bagaimana pelaksanaan perawatan taman-taman pada RTH tersebut, waktu bekerja para petugas yang ditugaskan, bagaimana pola pemotongan atau pembentukan taman dan juga tugas lainnya yang memang bertujuan untuk merawat RTH tersebut.” (Wawancara, Tanggal 3 Desember 2019, Pukul 10.30 Bapak Kurnia, S.TP., M.Si Selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah sajikan diatas, ditemukan penjelasan yang diberikan oleh informan bahwa pelaksanaan tugas dilapangan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Kecamatan Kerinci telah dilengkapi dengan aturan-aturan atau penduan kerja yang disebut sebagai Standar Operasional Prosedur.

Tetapi fakta yang penulis temukan dengan melakukan observasi dilapangan adalah tidak adanya petugas khusus yang di berikan tugas untuk mengelola RTH di Kabupaten Pelalawan tersebut, khususnya di Kecamatan Kerinci (Kota Kerinci), adapun petugas yang melakukan pekerjaannya merupakan petugas dari Dinas Kebersihan yang membersihkan lingkungan dari Ruang Terbuka Hijau tersebut.

Untuk melanjutkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, maka penulis akan melanjutkannya dengan pembahasan yang membahas tentang ketersediaan Sumber daya dan sarana prasarana dalam melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), dalam hal ini yang dimaksud adalah Sumber Daya dalam cakupan SDM, Dana, dan kebutuhan lainnya yang bisa dikatakan adalah sarana dan prasarana pelengkap taman, dan untuk mengetahui apa pendapat yang berikan oleh informan penulis yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan selaku penanggungjawab terhadap teman tersebut adalah sebagai berikut:

“Saya kira kita memiliki sumber daya yang cukup, baik itu dalam hal sumber daya manusia, dan juga anggaran untuk melakukan perawatan, dalam hal ini yang saya maksud itu perawatannya ya, tetapi untuk melengkapi sarana dan prasarananya, dan juga memperindah taman dengan penambahan tanaman yang bagus, saya kira dana yang kita miliki cukup terbatas, karna ini bukan bagian dari prioritas Pemerintah Kabupaten Pelalawan, tetapi walau demikian, kita tetap melakukan pengembangan walau memang prosesnya berjalan sedikit lambat” (Wawancara, Tanggal 3 Desember 2019, Pukul 10.30 Bapak Kurnia, S.TP., M.Si Selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa kondisi Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kabupaten Pelalawan, khususnya yang ada di Kecamatan Kerinci (Kota Kerinci) masih cenderung membutuhkan penanganan, baik itu dari segi ketersediaan fasilitas umum, manajemen parkir, kondisi taman yang kurang rimbun atau hijau, dan juga tanaman yang kurang memiliki makna atau hanya sekedar bunga dan tanaman biasa saja, dengan kondisi tersebut tentunya penulis berharap agar pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemeliharaan atau pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pelalawa ini, tentunya hal ini dikarenakan masyarakat sangat memiliki minat yang tinggi untuk mengunjungi taman sebagai tempat bersantai mereka di sore hari ataupun di pagi hari minggu untuk sekedar berolahraga.

Demikianlah hasil temuan penulis dilapangan yang berkaitan dengan pembahasan indikator yang pertama yaitu tentang Perencanaan, dimana indikator ini dilengkapi dengan pembahasan yaitu Standar Operasional Prosedur dan juga Ketersediaan Sumber Daya dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya penulis akan menyajikan pembahasan pada Indikator yang kedua yaitu Pengorganisasian.

2. Pengorganisasian

Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: *Organizing is grouping activities, assigning activities an providing the authority necessary to carry out the activities*. Pengorganisasian merupakan pengelompokkan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: *Organizing is grouping activities, assigning activities an providing the authority necessary to carry out the activities*. Pengorganisasian merupakan pengelompokkan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Pengorganisasian atau Organizing adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokkan, pengaturan dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya. Menurut Schermerhorn (1996:218), *Pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama*. Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut mengetahui dengan jelas tugas atau pekerjaan, tanggung jawab, hak dan wewenang mereka.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang kedua yaitu tentang pengorganisasian, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan cara penyebaran kuesioner dilapangan, dimana hasil penelitian ini akan di sajikan dalam bentuk tabel dan analisis pada pembahasan di bawah ini:

Tabel V.6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pengorganisasian

| No | Sub Indiaktor | Kategori Ukuran | | | Jumlah |
|----|--|-----------------|----|----|--------|
| | | T | CT | KT | |
| 1 | Pihak Dinas melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk bekerja sama dalam melakukan pengelolaan RTH | 2 | 28 | 20 | 50 |
| 2 | Memiliki pembagian kerja yang jelas dalam melakukan pengelolaan, sehingga dapat mewujudkan RTH yang dicapai. | 10 | 13 | 27 | 50 |

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2020

Dari data tabel V.6 di atas diketahui tanggapan responden untuk indikator ke dua yang membahas tentang pengorganisasian yang dinilai pada item pertama yaitu pihak Dinas melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk bekerja sama dalam melakukan pengelolaan RTH, yang memberikan tanggapan pada kategori “Terlaksana” berjumlah 2 orang, selanjutnya pada kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 28 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 20 orang.

Pada item kedua yaitu Memiliki pembagian kerja yang jelas dalam melakukan pengelolaan, sehingga dapat mewujudkan RTH yang dicapai, tanggapan pada kategori “Telaksana” berjumlah 10 orang, selanjutnya masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Terlaksana” berjumlah 13 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 27orang.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden masyarakat pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

Tabel V.7 : Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pengorganisasian

| No | Sub Indiaktor | Kategori Ukuran | | | Jumlah |
|---|--|-----------------|----|----|------------|
| | | T | CT | KT | |
| | | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | Pihak Dinas melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk bekerja sama dalam melakukan pengelolaan RTH | 6 | 56 | 20 | 82 |
| 2 | Memiliki pembagian kerja yang jelas dalam melakukan pengelolaan, sehingga dapat mewujudkan RTH yang dicapai. | 30 | 26 | 27 | 83 |
| Total Skor | | | | | 165 |
| <p> Skor Tertinggi = 50 x 3 = 150 2 Indikator = 150 x 2 = 300 Persentase Jawaban Responden $\frac{165}{300} \times 100\% = 55\%$ </p> | | | | | |

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Dilapangan 2020

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan memperoleh hasil 55% dengan kategori “Cukup Terlaksana”.

Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah didapatkan diatas, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan sumber informan yang berasal dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, dimana dalam hal ini wawancara yang penulis lakukan diwakilkan oleh Bapak Kurnia, S.TP., M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, dimana hasil wawancara penulis dengan beliau yang membahas tentang Koordinasi dan Sistem Pembagian Kerja dalam melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

“Tentunya harus ada koordinasi dengan beberapa pihak, bisa itu dinas-dinas terkait seperti pertamanan, Pekerjaan Umum, dan beberapa yang lainnya, hal ini harus dilakukan, karna tidak semuanya bisa dilakukan oleh Dinas Tata Ruang, kalau ada pembangunan jalannya, maka PU yang akan menanganinya, sistem pertamanannya, harus ada koordinasi juga dengan yang berwenang dibidangnya, jadi yang dinamakan kerjasama itu tidak bisa dihindari” (Wawancara, Tanggal 3 Desember 2019, Pukul 10.30 Bapak Kurnia, S.TP., M.Si Selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan)

Melanjutkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diatas, penulis juga menanyakan tentang bagaimana pembagian kerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataang Ruang dalam melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pelalawan, Khususnya di Kota Pangkalan Kerinci, dan jawaban yang belau berikan terkait dengan pertanyaan tersebut adalah:

“Pembagian kerja sudah diatur dalam Struktur Organisasi, dan satu lagi, untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau ini kan tidak melulu tiap hari harus mengurui itu, dalam sistem pembagian kerjanya, kita hanya melakukan pemantauan, dan untuk kebersihan dan perawatan, itu sudah ada tim yang di tunjuk untuk melakukannya dilapangan, Dinas berperan melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap tim yang telah dipekerjakan dilapangan, dan yang paling utama itu salah

satunya adalah tim kebersihan, karna masalah sampah inilah yang menjadi penyebab kondisi taman-taman kota terlihat tidak terawat dan kotor, maka dari itu, sampah menjadi salah satu yang setiap harinya dilakukan pembersihan, dan itu selalu kita pantau pelaksanaannya dilapangan” (Wawancara, Tanggal 3 Desember 2019, Pukul 10.30 Bapak Kurnia, S.TP., M.Si Selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Pelalawan, Khususnya di Kota Pengkalan Kerinci masih terbilang lambat dan tidak sepenuhnya menjadi prioritas, khususnya taman-taman yang ada di Kota Pengkalan Kerinci, hal ini tentu dapat dilihat dari kondisi fisik taman-taman dan RTH yang ada di kota tersebut, tanaman-tanaman yang ada masih sangat terbatas dan kurang diperhatikan jenis dari tanamannya sendiri. Khusus untuk penanganan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, penulis menemukan fakta bahwa petugas kebersihan memang melakukan penanganan pembersihan sampah disetiap pagi harinya, hal ini memang terbukti dilakukan.

3. Pengarahan

Pengarahan (*Direction*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan

dengan baik. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang ketiga yaitu tentang Pengarahan maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pengarahan

| No | Sub Indiaktor | Kategori Ukuran | | | Jumlah |
|----|--|-----------------|----|----|--------|
| | | T | CT | KT | |
| 1 | Adanya peringatan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dalam menjaga dan merawat RTH | 5 | 15 | 30 | 50 |
| 2 | Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang merusak RTH | 13 | 15 | 22 | 50 |

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2020

Dari data tabel V.8 di atas diketahui tanggapan responden untuk indikator ke tiga yang membahas tentang pengarahan yang dinilai pada item pertama yaitu Adanya peringatan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dalam menjaga dan merawat RTH, yang memberikan tanggapan pada kategori “Terlaksana” berjumlah 5 orang, selanjutnya pada kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 15 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 30 orang.

Pada item kedua yaitu Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang merusak RTH, tanggapan pada kategori “Telaksana” berjumlah 13 orang,

selanjutnya masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Terlaksana” berjumlah 15 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 22 orang.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden masyarakat pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

Tabel V.9 : Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pengarahan.

| No | Sub Indiaktor | Kategori Ukuran | | | Jumlah |
|--|--|-----------------|----|----|------------|
| | | T | CT | KT | |
| | | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | Pihak Dinas melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk bekerja sama dalam melakukan pengelolaan RTH | 15 | 30 | 30 | 75 |
| 2 | Memiliki pembagian kerja yang jelas dalam melakukan pengelolaan, sehingga dapat mewujudkan RTH yang dicapai. | 39 | 30 | 22 | 91 |
| Total Skor | | | | | 166 |
| <p> Skor Tertinggi = 50 x 3 = 150 2 Indikator = 150 x 2 = 300 Persentase Jawaban Responden $\frac{166}{300} \times 100\% = 55\%$ </p> | | | | | |

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Dilapangan 2020

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan memperoleh hasil 55% dengan kategori “Cukup Terlaksana”.

Bertujuan untuk melengkali hasil penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian lainnya yang bersifat wawancara, dimana proses wawancara ini penulis lakukan bersama informan penulis yang berasal dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, adapun wawancara yang penulis lakukan berkaitan degan pertanyaan tentang adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam hal sanki teguran atau peringatan, dan juga sanksi yang bersifat pidana atau denda, dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas terkait permasalahan ini, penulis telah diberikan keterangan oleh Bapak Kurnia, S.TP., M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, dimana hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Kita tentunya hanya memberikan himbauan kepada masyarakat agar sama-sama menjaga fasilitas umum, himbauan ini berbentuk pengumuman yang bisa di baca melalui media spanduk yang di bentangkan di beberapa titik di lokasi Kota Pangkalan Kerinci, diharapkan sosialisasi-sosialisasi seperti ini mampu memberikan kesadaran kepada masing-masing individu untuk dapat menjaga kebersihan kota Pangkalan Kerinci itu sendiri” (Wawancara, Tanggal 3 Desember 2019, Pukul 10.30 Bapak Kurnia, S.TP., M.Si Selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan)

Melanjutkan pembahasan diatas, penulis juga menanyakan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan terhadap masyarakat yang memang membandal dan tetap melakukan pembuangan sampah secara sengaja dan banyak, adapun

tanggapan yang diberikan oleh Bapak Kurnia, S.TP., M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, adalah sebagai berikut:

“Untuk permasalahan seperti ini memang menjadi dilema, disatu disisi kita tidak mungkin memantau 24 jam pergerakan masyarakat dan siapa saja yang melakukan pembuangan sampah sembarangan di tempat-tempat umum, karna kondisinya kan acak dan spontan, hal inilah yang menjadi masalah utamanya, makannya kita membutuhkan proses untuk mengedukasi masyarakat agar mau bekerjasama untuk tidak membuang sampah disembarang tempat, khususnya tempat umum, karna kita pun telah menyediakan tempat sampahnya, dan untuk sanksi, kita belum pernah memberikan sanksi apapun kepada masyarakat terkait hal ini, hanya himbauan yang telah kita lakukan sementara waktu ini” (Wawancara, Tanggal 3 Desember 2019, Pukul 10.30 Bapak Kurnia, S.TP., M.Si Selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan)

Dengan hasil penelitian diatas, ditemukan fakta bahwa memang pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum mampu memberikan sikap tegas terhadap kondisi kebersihan yang ada di Kota Pengkalan Kerinci, dimana untuk saat ini, hanya himbauan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap masyarakat agar tidak melakukan pembuangan sampah secara sembarangan.

Dan berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan keadaan yang dimana benar bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembuangan sampah secara sembarangan dan telah menyediakan beberapa tempat sampah di lokasi-lokasi tertentu khususnya di Ruang Terbuka Hijau, tetapi penulis berpendapat bahwa cara tersebut tidaklah efektif, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memberikan efek jera dengan

melaksanakan pemberian sanksi pidana kepada mereka yang kedapatan melakukan pembuangan sampah secara sembarangan, atau setidaknya adanya sanksi denda kepada mereka yang tertangkap tangan melakukan pembuangan sampah di tempat-tempat umum.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128). Sedangkan tujuan dari pengawasan adalah menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi, mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi, mendapatkan efisiensi dan efektivitas.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang terakhir yaitu tentang Pengawasan maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.10 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pengawasan

| No | Sub Indiaktor | Kategori Ukuran | | | Jumlah |
|----|--|-----------------|----|----|--------|
| | | T | CT | KT | |
| 1 | Melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan | 13 | 15 | 22 | 50 |
| 2 | Selalu melakukan evaluasi setiap melakukan pengawasan di lapangan | 2 | 19 | 29 | 50 |

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2020

Dari data tabel V.10 di atas diketahui tanggapan responden untuk indikator ke empat yang membahas tentang pengawasn yang dinilai pada item pertama yaitu Melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yang memberikan tanggapan pada kategori “Terlaksana” berjumlah 13 orang, selanjutnya pada kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 15 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 22 orang.

Pada item kedua yaitu Selalu melakukan evaluasi setiap melakukan pengawasan di lapangan, tanggapan pada kategori “Telaksana” berjumlah 2 orang, selanjutnya masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Terlaksana” berjumlah 19 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 29 orang.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden masyarakat pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

Tabel V.11 : Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pengawasan.

| NO | Sub Indiaktor | Kategori Ukuran | | | Jumlah |
|---|---|-----------------|----|----|------------|
| | | T | CT | KT | |
| | | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | Melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. | 39 | 30 | 22 | 91 |
| 2 | Selalu melakukan evaluasi setiap melakukan pengawasan di lapangan | 6 | 38 | 29 | 73 |
| Total Skor | | | | | 164 |
| <p> Skor Tertinggi = 50 x 3 = 150 2 Indikator = 150 x 2 = 300 Persentase Jawaban Responden $\frac{164}{300} \times 100\% = 55\%$ </p> | | | | | |

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Dilapangan 2020

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan memperoleh hasil 55% dengan kategori “Cukup Terlaksana”.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di daerah Kabupaten Pelalawan, salah satu hal yang harus dilakukan adalah sistem pengawasan terhadap hasil pengelolaan dan ruang terbuka hijau itu sendiri,

maksud dari pengawasan disini adalah bagaimana aparat yang berwenang yang salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan tugasnya dalam mengawasi fasilitas yang telah di bangun.

Pelaksanaan pengawasan yang dimaksud dalam hal ini tentunya berkaitan dengan bagaimana menjaga agar tidak adanya perusakan yang dilakukan terhadap fasilitas umum di Ruang Terbuka Hijau dan taman-taman di Kota Pangkalan Kerinci, karna cenderung hal yang paling cepat membuat rusak fasilitas umum adalah ulah usil dari masyarakat itu sendiri, dan utuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pelalawan, Khususnya Kota Pangkalan Kerinci, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis bersama dengan Bapak Kurnia, S.TP., M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, dimana hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Seperti yang saya katakana tadi, salah satu hal yang sulit dilakukan adalah melakukan pengawasa tersebut, karna kita tidak mungkin melakukan pemantauan selama 24 jam kepada masyarakat, tetapi pencegahan kita lakukan, dimana ketika sudah malam hari, kita membatasi kunjungan atau melakukan patroli ke lokasi-lokasi taman atau tempat umum yang nantinya bekerjasama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karna memang merekalah yang berwenang untuk hal tersebut, cara-cara seperti ini diharapkan mampu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan” (Wawancara, Tanggal 3 Desember 2019, Pukul 10.30 Bapak Kurnia, S.TP., M.Si Selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, dimana penulis melakukan pematauan dimalam hari, dan memang ternyata benar

apa yang dikatakan oleh informan penulis yaitu bapak Kurnia, S.TP., M.Si dimana aktivitas yang berlangsung di tempat-tempat umum seperti taman dan RTH itu sudah tidak terlihat lagi menjelang tengah malam, dan beberapa petugas satuan polisi pamong praja juga terlihat beberapa orang melakukan patroli dilokasi tersebut, hal ini tentunya bermanfaat untuk mencegah beberapa tindakan yang dianggap melanggar norma-norma, baik itu norma agama ataupun melanggar hukum yang berpotensi terhadap tindakan kejahatan ataupun terjadinya perusakan terhadap fasilitas yang ada di lokasi ruang terbuka hijau atau taman tersebut.

C. Rekapitulasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan

Adapun hasil rekapitulasi pada penelitian ini adalah untuk menyimpulkan keseluruhan jawaban yang telah di dapatkan dari penyebaran kuesioner penulis kepada responden masyarakat, dimana hasil kuesionernya adalah sebagai berikut:

Tabel V.12 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan

| No | Indiaktor | Rekapitulasi |
|-----------|------------------|--------------|
| 1 | Pengorganisasian | 62 % |
| 2 | Perencanaan | 55 % |
| 3 | Pengarahan | 55 % |
| 4 | Pengawasan | 55 % |
| Total | | 227 % |
| Rata-Rata | | 57 % |

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2020

Berdasarkan data pada tabel V.12 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden masyarakat dari keseluruhan sampel yang ada pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya "*Pegorganisasian, Perencanaan, Pengarahan, Pengawasan*". Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan pada kategori jawaban "Cukup Terlaksana" dengan rata-rata 57% responden masyarakat dari total keseluruhan jumlah responden masyarakat yaitu 50 orang responden.

D. Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Dinas PUPR dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan.

Dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Kota Pengkalan Kerinci, tentunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami beberapa faktor penghambat yang berdampak kepada proses pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum tersebut, dan untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis akan menyajikannya pada point-point pembahasan berikut ini:

1. Perencanaan, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Kurnia, S.TP., M.Si yang menjabat selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, beliau mengatakan salah satu faktor penghambat dalam hal pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Pangkalan Kerinci adalah Sumber Daya yang terbatas, dalam hal ini yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia yang jumlah terbatas untuk melakukan pekerjaan, khususnya dalam hal melakukan pengawasan, dan juga Sumber Daya Anggaran yang di anggarkan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang jumlahnya terbatas dan harus melakukan penganggaran yang efektif.
2. Pengkoordinasian, kondisi Sumber Daya Manusia (Masyarakat) yang memiliki tingkat kesadaran cenderung rendah, hal ini dikatakan berkaitan dengan pemeliharaan dan saling menjaga fasilitas umum yang masih kurang, beberapa oknum masyarakat cenderung ada yang melakukan perusakan terhadap fasilitas umum di taman dan Ruang

Terbuka Hijau, salah satu hal yang biasa di rusak adalah lampu taman, bunga, dan fasilitas lainnya.

3. Pengarahan, rasa memiliki yang masih kurang di diri masyarakat, dimana hal ini digambarkan oleh Bapak Kurnia, S.TP., M.Si yang menjabat selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dimana contohnya adalah ketika ada orang yang membuang sampah, masyarakat cenderung membiarkan, dan ataupun ketika ada orang yang merusak fasilitas umum, masyarakat juga seolah tidak peduli dan mengabaikannya.
4. Pengawasan, salah satu kendala yang dihadapi dalam menjalankan pengawasan tentunya masih berkaitan dengan Sumber Daya yang terbatas, baik itu sumber daya manusia dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, ataupun Sumber Daya Anggaran yang juga memiliki keterbatasan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan yang terkait tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Kabupaten Pelalawan maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuissioner di lapangan yang penulis lakukan yaitu berada pada kategori Cukup Terlaksana, hal ini dikarnakan di dalam pelaksanaanya di lapangan masih terdapat kekurangan yang menyebabkan pengelolaan ruang terbuka hijau belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Kekurangan yang pertama adalah pada Perencanaan sumber daya dan sarana prasarana untuk melaksanakan pengelolaan ruangan terbuka hijau, hal ini dikarnakan kurangnya sumber dana anggaran yang tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang kedua adalah kurang optimalnya pada pengorganisasian atau dalam pembagian kerja seperti pada bidang pertamanan maka tentunya pihak PU tidak memiliki keahlian dalam sistem pertamanan, makanya perlu adanya kerja sama dengan bidang yang lain, tetapi tentunya yang menjadi masalah adalah pada penyesuaian waktu jam kerja untuk melakukan koordinasi peninjauan di lapangan. Yang ke tiga adalah pengarahan kepada masyarakat atau dapat diatakan pemberian peringatan serta sanksi kepada masayrakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah merusak sarana dan prasarana taman. Dan yang

terakhir adalah tidak optimalnya dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan agar ruangan terbuka Hijau

Kesimpulan yang ditemukan diatas memberikan gambaran bahwa dari keseluruhan proses penelitian, masyarakat menilai bahwa pengelolaah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum berjalan dengan maksimal, masih banyak kondisi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, dimana salah satunya adalah perbaikan dari kondisi Ruang Terbuka Hijau itu sendiri, penjagaan terhadap fasilitas yang disediakan, serta kebersihan dan fasilitas umum yang belum tersedia di lokasi Ruang Terbuka Hujau Tersebut, dalam hal ini fasilitas umum yang dimaksud adalah musholah dan toilet yang dapat digunakan pengunjung.

Berkaitan dengan kesimpulan yang telah di jelaskan diatas, adapun hambatan yang ditemui oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pelalawan salah satunya adalah Sumber Daya yang terbatas, dalam hal ini yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia yang jumlah terbatas untuk melakukan pekerjaan, khususnya dalam hal melakukan pengawasan, dan juga Sumber Daya Anggaran yang di anggarkan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang jumlahnya terbatas dan harus melakukan peganggaran yang efektif. Selanjutnya adalah kondisi Sumber Daya Manusia (Masyarakat) yang memiliki tingkat kesadaran cenderung rendah, hal ini dikatakan berkaitan dengan pemeliharaan dan saling menjaga fasilitas umum yang masih kurang, beberapa oknum masyarakat cenderung ada yang melakukan

perusak terhadap fasilitas umum di taman dan Ruang Terbuka Hijau, salah satu hal yang biasa di rusak adalah lampu taman, bunga, dan fasilitas lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan faktor penghambat yang telah di sajikan diatas, maka penulis akan memberikan saran kepada pihak-pihak terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mana saran ini tentunya bertujuan untuk memberikan masukan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pelalawan, dan adapun saran dari penulis adalah berkaitan dengan tujuan penelitian ini, tentunya penulis menyarankan hal yang berkaitan dengan kondisi Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, dimana penulis menyarankan agar Dinas melakukan penambahan personil agar dapat menjalankan segala tugas yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsinya secara efektif dan efisien, dan juga di tingkatkannya anggaran untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pelalawan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus bisa bekerjasama atau bisa saling berkoordinasi antara bidang pembangunan dengan bidang pertamanan agar pembangunan RTH bisa sesuai dengan yang diharapkan, saran berikutnya adalah pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus memberikan sanksi tegas kepada masyarakat atau oknum yang sudah merusak sarana dan prasarana pada ruang terbuka hijau, dan berdasarkan faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, Saran penulis adalah agar masyarakat di Kabupaten Pelalawan, Khususnya di Pangkalan Kerinci agar lebih memiliki rasa memiliki terhadap fasilitas umum yang dibangun pemerintah untuk

kepentingan umum, salah satunya adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Ruang Terbuka Hijau, mulai dari fasilitas lampu, bunga, dan lainnya, hal ini juga harus diseimbangkan dengan adanya pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Pelalawan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*.
Malayu: Rineka Cipta
- Hasibuan, Malayu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi
Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ismail Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta:
Kencana,.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT
RajaGrafindo Persada
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi
Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
Publishing
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama*, Jakarta:
PT. Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 2005. *Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Rineka
Cipta.
- Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rauf, Rahyunir, Munaf Yusri. 2015. Lembaga Kemasyarakatan Indonesia.
Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Government (Pemerintahan yang baik)*. Bandung: CV.
Mandar Maju.
- Syafiie, Kencana. 2005. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka
Cipta.
- _____. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- _____. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.

Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta. Liberty.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

B. Dokumentasi Penelitian:

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Pelelawan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Penataan Ruang Kabupaten Pelelawan.

Zulkifli, DKK. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013*. Pekanbaru : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

C. Jurnal

Hakim, Oki Rahman, Munaf Yusri. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Periode 2009-2014. Jurnal Vol. 1 No. 2, Dikutip tanggal 3 September 2020 Pukul 16.30 Wib.

Munaf, Yusri, Febrian Raggi Ade dan Setiawan Rizky.2018. Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Jurnal Wedana Vol. IV No.2 . Dikutip tanggal 3 September 2020 Pukul 17.00 Wib.